

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Ficar Hadjar. *Etika Hakim dan Integritas Peradilan*. Jakarta: Lembaga Kajian Hukum, 2019.
- Ahmad Zahid. “Integrasi Hukum Islam dan Hukum Nasional.” *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 2 (2018): 153–168.
- Al-Ghazali. *Ihya Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1983.
- . *al-Mustasfa min Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Al-Mawardi. *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- . *al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.
- Al-Qur’an, Surah an-Nisa (4): 58.
- , Surah Shad (38): 26.
- , Surah al-Maidah (5): 42.
- Al-Suyuti. *al-Asybah wa al-Nazair*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998.
- Al-Syatibi. *al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*. Kairo: Dar Ibn Affan, 1997.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Belly Isnaeni. “Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen.” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2021).

- Benedictus B. Nurhadi. "Asas Ultra Petita dalam Perspektif Hukum Acara." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 2 (2018): 145–162.
- Bernard Arief Sidharta. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Chandranegara, I. S. "Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang dan Jalan Mencapai Keadilan Konstitusional." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2012).
- Erlani, K., dan W. Novianto. "Penerapan Hukum Progresif Dalam Putusan Hakim yang Ultra Petita di Indonesia." *Unika Repository* 2, no. 1 (2017).
- Gustav Radbruch. *Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht*. *Süddeutsche Juristen-Zeitung*, 1946.
- . *Rechtsphilosophie*. Stuttgart: Koehler, 1973.
- . *Legal Philosophy*. Oxford: Clarendon Press, 2006.
- Hans Kelsen. *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press, 1967.
- Jan M. Otto. *Rule of Law for Development: Policy, Implementation and Measurement*. Leiden: Leiden University Press, 2012.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- . *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 182 ayat (4).

———, Pasal 67.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 1 ayat (1).

Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik*. Bandung: Alumni, 2015.

M. Huda. “Keadilan Substantif dalam Perspektif Siyasah Qadhaiyyah.” *Jurnal Al-Manahij* 12, no. 2 (2018): 145–158.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Mukti Fajar ND, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.

———. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

R. Soesilo. *Tafsir Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Politeia, 2017.

R. Subekti. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT Intermedia, 2014.

R. Wiyono. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

———. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, 2009.

———. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2006.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2010.

———. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2010.

Sahih al-Bukhari. *Kitab al-Ahkam*, Hadis No. 2680.

Sunan Abi Dawud. *Kitab al-Aqdiyah*, Hadis No. 3573.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3);
Pasal 24 ayat (1); Pasal 28D ayat (1).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
Pasal 182 ayat (4).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, Pasal 5 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 435 jo. Pasal 138.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5
ayat (1).

———. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157*.

Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh al-Siyasah al-Syariyyah*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2001.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.